

BAB II

KONDISI EKONOMI-POLITIK INTERNASIONAL INDONESIA

Pada bab ini, penulis menjelaskan Kondisi Ekonomi-Politik Internasional Indonesia pada tahun 2010 hingga 2014. Kemudian penulis menjelaskan Peningkatan Peran dan Kemampuan Indonesia dalam Diplomasi Perdagangan Internasional.

Peningkatan peran Indonesia dalam forum-forum kerja sama internasional memberikan dampak positif terhadap perkembangan ekonomi-politik di dalam negeri. Setelah itu, penulis menjelaskan Kondisi Hubungan Bilateral antara Indonesia dengan Afrika Selatan dalam Bidang Ekspor dan Impor. Kondisi tersebut dimulai dengan pembahasan tentang awal mula hubungan bilateral Indonesia dan Afrika Selatan sebelum tahun 2010.

A. Kondisi Ekonomi-Politik Internasional Indonesia (2010-2014)

Kondisi Ekonomi-Politik Internasional Indonesia tahun 2010-2014 relatif stabil dan memberikan hasil yang baik. Pencapaian itu didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang memuaskan di tengah kondisi ekonomi dunia yang melemah. Meskipun ekonomi dunia yang melambat memberikan dampak serius terhadap negara-negara lain, Indonesia mampu membuktikan kestabilan ekonomi dan politiknya dengan berusaha melakukan berbagai cara untuk memperbaiki kredibilitasnya di mata regional dan internasional melalui pertumbuhan ekonominya

yang cukup stabil dengan rata-rata pendapatan tahun 2010-2014 sebesar USD 893,25 Miliar.²⁰

Dalam bidang politik, pertumbuhan ekonomi yang dialami tersebut mendapat pengakuan dunia internasional, yang menempatkan Indonesia sebagai negara terbesar ketiga sebagai bukti keberhasilan pemerintahan dengan sistem demokrasi.²¹ Padahal demokrasi di Indonesia belum lama diterapkan menjadi sistem pemerintahan negara. Pemerintah dapat menggunakan kesempatan ini untuk menjadikan negara-negara di dunia memberikan dukungan dan simpati dalam berbagai bidang. Sehingga, kondisi politik berjalan dengan stabil dan para mitra kerja mendukung adanya kebijakan politik luar negeri. Negara-negara asing yang ikut memberikan respon positif terhadap kepentingan Indonesia antara lain Afrika Selatan, Amerika dan China.

Perubahan dalam arah kebijakan politik luar negeri Indonesia mengakibatkan negara ini lebih membuka diri terhadap negara lain. Kondisi politik yang stabil dan pengakuan internasional yang kondusif membuat hubungan kerja sama antara Indonesia dengan negara lain semakin bertambah dan jangkauan diplomasi meluas dalam berbagai bidang. Sehingga kesejahteraan sedikit demi sedikit mulai dirasakan masyarakat dan hasil demokratisasi Indonesia secara umum telah mengalami peningkatan.

²⁰ Bappenas, Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2010 – 2014, <http://www.bappenas.go.id> diakses pada 20 April 2015

²¹ Bappenas, Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2010 – 2014, <http://www.bappenas.go.id> diakses pada 20 April 2015

Upaya-upaya pemerintah dalam menjaga kestabilan ekonomi dan politik harus dilanjutkan dalam menentukan kebijakan, disertai dengan kerja keras dalam program-program prioritas nasional. Berdasarkan kepentingan nasional Indonesia, maka politik luar negeri harus menunjang usaha pembangunan ekonomi sebagai prioritas utama dalam rangka pembangunan nasional secara total. Perbaikan ekonomi tersebut harus dilakukan secara berdampingan dengan stabilitas politik dan keamanan serta menggalang kerja sama dengan masyarakat. Hubungan kerja sama ini hendaknya dilakukan secara efektif, mengingat pelaku ekonomi utama selain pemerintah Indonesia ada juga UKM, pengusaha dan investor. Indonesia harus lebih tepat dalam menempuh strategi untuk menyuarakan kepentingan ekonomi-politiknya di forum-forum internasional agar kepentingan Indonesia dalam perdagangan internasional berjalan sesuai dengan arah yang diharapkan.

Membangun negara yang keadaan politiknya kuat memerlukan akumulasi kekayaan atau kapital, dengan memprioritaskan pembangunan ekonomi di dalam negeri melalui perdagangan internasional. Perdagangan internasional harus dijalankan sebagai sarana perjuangan mencapai kepentingan nasional. Prioritas nasional tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2010-2014. Periode tersebut merupakan kelanjutan dari RPJMN 2004-2009 yang pada pemerintahannya meletakkan landasan operasional politik luar negeri Indonesia dalam program utama nasional kebijakan luar negeri dan berjalan hingga saat ini.²²

²² Mohtar Mas'ood, *Ekonomi-Politik Internasional dan Pembangunan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003 halaman

Program kebijakan luar negeri Indonesia adalah pemantapan politik luar negeri dan optimalisasi diplomasi Indonesia dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri.²³ Hubungan luar negeri tersebut dapat dijalin apabila negara mampu bersosialisasi dengan baik dalam kawasan regional maupun internasional. Tujuan pokok dari upaya tersebut adalah untuk meningkatkan kinerja politik luar negeri dan diplomasi Indonesia dalam ranah internasional bagi proses demokrasi, stabilitas politik dan persatuan nasional.

Sudah sewajarnya pemerintah melakukan kebijakan dan terobosan untuk bersaing dengan negara lain. Salah satu tindakan pemerintah yaitu dengan cara standarisasi terhadap barang, dikenal dengan sebutan Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi produk yang akan dipasarkan. Hal tersebut menarik perhatian negara lain dengan menegaskan bahwa produk Indonesia yang dipasarkan di tingkat internasional memiliki standar yang sama dengan barang di dalam negeri. Selain itu, kebijakan pemerintah dalam menyelenggarakan promosi perdagangan dapat digunakan untuk mengembangkan pasar internasional dan Indonesia mendapatkan citra yang baik di ranah internasional.

B. Peningkatan Peran dan Kemampuan Indonesia dalam Diplomasi Perdagangan Internasional

Dalam rangka meningkatkan peran dan kemampuan, Indonesia bekerja sama dengan meningkatkan perdagangan internasional. Hal itu dilakukan dengan cara

²³ Bappenas, Evaluasi Paruh Waktu RPJMN, <http://www.bappenas.go.id> diakses pada 9 Maret 2015

diplomasi. Diplomasi tersebut merupakan salah satu cara yang digunakan Indonesia dengan negara lain dalam bekerja sama dan menghindari kesalahpahaman, yang dapat mengakibatkan perang. Dengan adanya kepentingan negara Indonesia, pemerintah terfokus pada akses pasar produk ekspordan impor yang saling menguntungkan sebagai *ballancing* antar negara. Indonesia membutuhkan diplomasi yang sangat kuat agar timbul saling percaya dan menjaga kepentingan satu sama lain tanpa melanggar aturan-aturan yang disepakati. Adapun cara yang dilakukan Indonesia adalah dengan kerja sama multilateral, bilateral dan regional. Kerja sama ini semakin bertambah baik seiring dengan kebutuhan masing-masing negara.

Pada forum bilateral, Indonesia bekerja sama dengan Afrika Selatan dan dalam forum regional, Indonesia aktif dalam pertemuan *Association of Southeast Asian Nations* dan forum multilateral, Indonesia bergabung dan memperkuat peran, salah satunya di CIVITS. Posisi Indonesia semakin mantap di dalam kelompok CIVITS (China, India, Vietnam, Indonesia, Turkey, *South Africa*).²⁴ Selain itu, bergabungnya Indonesia dalam WTO serta organisasi lain dalam perdamaian dunia menarik perhatian. Sikap terbuka Indonesia inilah yang membuat negara lain semakin percaya untuk memulai dan menambah jenis kerja sama internasional.

²⁴ Bappenas, Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2010 – 2014, <http://www.bappenas.go.id> diakses pada 20 April 2015

Adapun peningkatan peran yang saat ini dijalankan oleh Indonesia diantaranya :

1. Keaktifan Indonesia dalam Konferensi Asia Afrika (KAA) dan *Free Trade Area* (FTA)

Munculnya KAA merupakan tanda berakhirnya Perang Dunia I yang membawa pengaruh besar bagi bangsa-bangsa Asia dan Afrika untuk memperoleh dan mempertahankan kemerdekaan. Di samping itu, ditandai munculnya kekuatan ideologis, politis dan militer di dunia membuat Indonesia mengikuti dan turut mengimbangi perkembangan tersebut dengan politik yang bebas aktif. Indonesia dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat dan bernegara selalu berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945. Salah satu bentuk penyelenggaraan kehidupan bernegara adalah menjalin kerja sama dengan negara lain. Kebijakan yang menyangkut hubungan dengan negara lain terangkum dalam kebijakan politik luar negeri. Oleh karena itu, pelaksanaan politik luar negeri Indonesia harus berdasarkan ideologi negara dan UUD 1945. Keaktifan Indonesia ditandai dengan munculnya gagasan untuk menggalang kerja sama dan solidaritas antarbangsa dengan menyelenggarakan KAA. Dasasila Bandung adalah poin hasil pertemuan Konferensi Asia Afrika yang dilaksanakan pada 18-25 April 1955.²⁵ Poin ini berisi tentang

²⁵ Sidik Jatmika, *Hubungan Internasional di Kawasan Afrika*, Diktat Pengantar Hubungan Internasional, Yogyakarta, 2015 halaman 137

“pernyataan mengenai dukungan bagi kedamaian dan kerja sama dunia”. Isi Dasasila

Bandung diantaranya :

- a) Menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta asas-asas yang termuat di dalam piagam PBB.
- b) Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa.
- c) Mengakui persamaan semua suku bangsa dan persamaan semua bangsa, besar maupun kecil.
- d) Tidak melakukan intervensi atau campur tangan dalam persoalan dalam negeri lain.
- e) Menghormati hak-hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri secara sendirian ataupun kolektif yang sesuai dengan piagam PBB.
- f) Tidak menggunakan peraturan-peraturan dari pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus dari salah satu negara besar dan tidak melakukannya terhadap negara lain.
- g) Tidak melakukan tindakan-tindakan ataupun ancaman agresi dan penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah maupun kemerdekaan politik suatu negara.
- h) Menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan jalan damai, seperti perundingan, persetujuan, arbitrase (penyelesaian masalah hukum), ataupun lain-lain dengan cara damai, menurut pilihan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan piagam PBB.

- i) Memajukan kepentingan bersama dan kerja sama.
- j) Menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasional.

Bagi Indonesia, keputusan untuk bergabung dengan KAA merupakan bukti nyata pemerintah untuk melaksanakan politik luar negeri bebas aktif. Ini selaras dengan landasan konstitusi yang mengamanatkan agar Indonesia berpartisipasi dalam mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan pilar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Prinsip dasar dari KAA merupakan butir-butir turunan pada dokumen yang mengacu pada tiga pilar bahasan yakni solidaritas politik, kerja sama ekonomi dan hubungan sosial. Pilar-pilar tersebut menjadi tujuan bersama bagi anggota KAA untuk dapat memajukan negara masing-masing di tengah kondisi internasional yang semakin rumit.

Pesan yang tertera pada Dasasila Bandung tersebut mengingatkan bahwa saat ini masyarakat global harus menjalankan pilar-pilar untuk kemajuan bersama bagi negara-negara di Asia dan Afrika. Pilar-pilar yang diterapkan akan memberikan kemajuan pada bidang infra struktur dan supra struktur negara termasuk Indonesia. Selain itu, pelaksanaan tersebut dapat mendorong pertumbuhan global yang kuat, berkelanjutan dan berkeseimbangan.

Peran aktif Indonesia dalam KAA merupakan upaya untuk mengoptimalkan kemauan dan kemampuan dalam menjawab tantangan global seperti FTA. Keberadaan FTA di dunia memaksa semua negara termasuk Indonesia, harus mau

membuka diri kepada negara maupun non-negara di dunia khususnya pada perdagangan internasional. Selain itu, FTA juga merupakan ajang untuk mendeklarasikan kepentingan politik yang diinginkan. Jika Indonesia berperan dalam memfasilitasi solidaritas politik, kerja sama ekonomi dan efektifnya hubungan dengan negara-negara Asia-Afrika, akan membuat Indonesia semakin disegani baik di kawasan Asia, maupun Afrika.

Peran aktif Indonesia sudah dimulai sejak lama, salah satunya menjadi negara penggagas terselenggarakannya KAA Bandung 1955. Hal ini merupakan sejarah penting yang menaikkan citra baik negara Indonesia di mata internasional. Bersama dengan lima negara penggagas KAA, Indonesia sukses menyelenggarakan konferensi tingkat internasional pertama kali yang dihadiri segenap tokoh Asia dan Afrika di Bandung. Kelima tokoh tersebut telah membuat perubahan bagi kelancaran ekonomi-politik dan menyokong pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia dan Afrika. Negara penggagas KAA 1955 dan perwakilan dari masing-masing negara yaitu Indonesia diwakili oleh Ali Sastroamidjojo; Birma (sekarang Myanmar) diwakili U Nu; Sri Lanka diwakili John Kotelawala; India diwakili oleh Jawaharlal Nehru dan Pakistan diwakili Muhammad Ali.²⁶

²⁶ Tempo. Co., Inilah Lima Tokoh Penggagas KAA 1955, *m.tempo.co/read/news/2015/04/21* diakses pada 10 November 2015

Dasasila Bandung merupakan hasil kesepakatan yang didapat dari KAA Bandung 1955.²⁷ Inti dari kesepakatan tersebut yaitu hidup secara berdampingan dengan damai dan saling menghargai integritas dan kedaulatan teritorial serta tidak campur tangan dalam urusan domestik masing-masing negara. Kemudian menghormati hak-hak dasar manusia, menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan jalan damai, menghormati hukum dan menghormati hak bela diri secara mandiri atau kolektif serta mengakui persamaan semua suku bangsa dan memajukan kepentingan bersama. Kesepakatan tersebut merupakan salah satu cara yang ditempuh demi menyelesaikan Perang Dingin yang terjadi. Sumbangan prinsip dan solusi yang ditawarkan pada KAA dalam menyelesaikan konflik ini cukup komprehensif. Sehingga pengaruh yang besar terhadap situasi internasional ini menunjukkan bahwa “negara dunia ke-tiga” telah muncul sebagai penetral atau non-blok yang menjadi perhatian seluruh dunia.

2. Peningkatan Akses Pasar dan Promosi Ekspor

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi-politik Indonesia yang semakin membaik, investasi dan ekspor barang maupun jasa cenderung meningkat. Pada kondisi iklim dunia yang memaksa setiap negara untuk bersaing, Indonesia meningkatkan kerja keras dalam segala aspek tidak terkecuali dalam bidang ekspor. Peningkatan akses pasar dan promosi ekspor adalah contoh partisipasi pada forum kerja sama dan pameran dagang internasional. Cara pemerintah untuk mengirim misi

²⁷ M. Ahalla Tsauro, Pengaruh Konferensi Asia-Afrika Terhadap Politik Luar Negeri Indonesia, *ahalla-ts-fisip12.web.unair.ac.id* diakses pada 19 November 2015

dan mendorong kunjungan pembeli ke Indonesia dan kegiatan promosi yang diadakan yaitu dengan cara mendirikan pusat promosi dagang internasional dan aktif dalam rezim internasional.

Pemerintah membuka Pusat Promosi Dagang atau International Trade Promotion Center (ITPC) terbaru, salah satunya di Afrika Selatan guna menggenjot ekspor Indonesia. ITPC merupakan salah satu fasilitas yang dapat digunakan untuk produsen domestik dalam memasarkan barang dan disetujui oleh pemerintah Afrika Selatan sebagai wujud eratnya hubungan diplomatik di antara keduanya.²⁸ Pihak KBRI bekerja sama lebih gencar dengan persiapan dan cakupan yang lebih besar dengan menggalang koordinasi dalam melakukan sosialisasi yang berfokus pada peningkatan perdagangan.

Indonesia melalui Kementerian Perdagangan aktif dalam mengikuti pameran internasional. Diantara 2010-2014 telah dilakukan sebagai berikut :²⁹

- a. *World Expo Shanghai China 2010* (WESC 2010)
- b. *Indonesia Design Exhibition* (INDEX 2011)
- c. *Trade Expo Indonesia 2012* (TEI 2012)
- d. *Decorex 2013*

²⁸ Tempo. Co., Genjot Ekspor, Pemerintah Bidik Afrika Selatan. *m.tempo.co/topic/masalah/2353/ekspor dan impor* diakses pada 10 November 2015

²⁹ Kemendagri, Laporan Akhir Tahun, *Kemendag.go.id/m/id/news/2014/07/07* diakses pada 12 November 2015

e. *Zimbabwe International Trade Fair 2014 (ZITF 2014)*

Pameran tersebut merupakan tindakan pemerintah dalam merealisasikan kepentingan Indonesia. Salah satu bukti tataran hubungan bilateral setelah diadakannya pameran tersebut, Indonesia membentuk kemitraan strategis dengan 14 negara. Adapun kemitraan tersebut, Indonesia dengan : Afrika Selatan, Amerika Serikat, Australia, Brasil, India, Inggris, Jepang, Korea Selatan, Prancis, Rusia, Republik Rakyat Tiongkok, Turki, dan Belanda.³⁰ Kemitraan strategis itu masih terus berjalan hingga saat ini.

C. Kondisi Hubungan Bilateral Indonesia-Afrika Selatan dalam bidang Ekspor dan Impor

Kondisi hubungan bilateral antara Indonesia dan Afrika Selatan berjalan dengan baik. Kedua negara ini memiliki kesamaan sejarah dalam politik dan memiliki sumber batu bara yang melimpah. Melihat sejarah Indonesia dan Afrika Selatan sebagai negara bekas kolonialisme, tidak heran kedua negara ini menginginkan kehidupan yang lebih baik, serta secara bersama-sama bersatu melawan kolonialisme dan segala macam penjajahan di dunia. Faktor tersebut dapat menjadi pemersatu dalam meningkatkan hubungan diplomasi antara kedua negara. Hubungan bilateral Indonesia dengan Afrika Selatan berjalan sudah cukup lama. Oleh karena tidak pernah terjadi perselisihan, hubungan diantara keduanya berjalan baik hingga saat ini.

³⁰ Bappenas, *Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2010 – 2014*, <http://www.bappenas.go.id/files/buku-evaluasidiakses> pada 20 April 2015

Hal ini dibuktikan dengan ditanda tangannya Komunique Bersama Pembukaan Hubungan Diplomatik di New York pada 12 Agustus 1994 antara Indonesia dan Afrika Selatan, yang secara resmi menjalin hubungan bilateral.³¹

Solidaritas Indonesia dimulai pada bidang politik dalam mendukung perjuangan ANC (*African National Congress*) menentang politik apartheid yang terjadi di Afrika, termasuk Afrika Selatan. Posisi ANC dan dukungan internasional ini secara terus menerus memberikan tekanan pada rezim apartheid. Hubungan Indonesia dengan ANC memberikan sebuah platform bagi negara-negara di Asia maupun Afrika untuk berjuang melawan apartheid.

Hubungan bilateral tersebut diikuti oleh manifestasi dari pembentukan “jembatan” intrakawasan. Indonesia dan Afrika Selatan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan *New Asian African Strategic Partnership* (NAASP) atau disebut dengan Komitmen Kemitraan Strategis Asia dan Afrika. Kedua negara ini memiliki mandat untuk menjadi *co-chair* atau Ketua Bersama Pertemuan Asia-Afrika yang diselenggarakan di Afrika Selatan pada tahun 2010. Di dalam *Declaration on the NAASP* juga dibentuk pilar-pilar untuk mempererat kerja sama diantaranya:³²

1. Solidaritas Politik

Solidaritas politik ditunjukkan dengan cara menghargai kedaulatan masing-masing terhadap kebijakan baik di dalam maupun luar negeri.

³¹ Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, Menerobos Peluang Pasar Afrika Selatan, www.indag-diy.go.id/informasi diakses pada 11 November 2015

³² Kemlu, Asia Pacific Economic Community, <http://kemlu.go.id/documents> diakses pada 13 November 2015

2. Kerja sama Ekonomi dan Hubungan Sosial Budaya

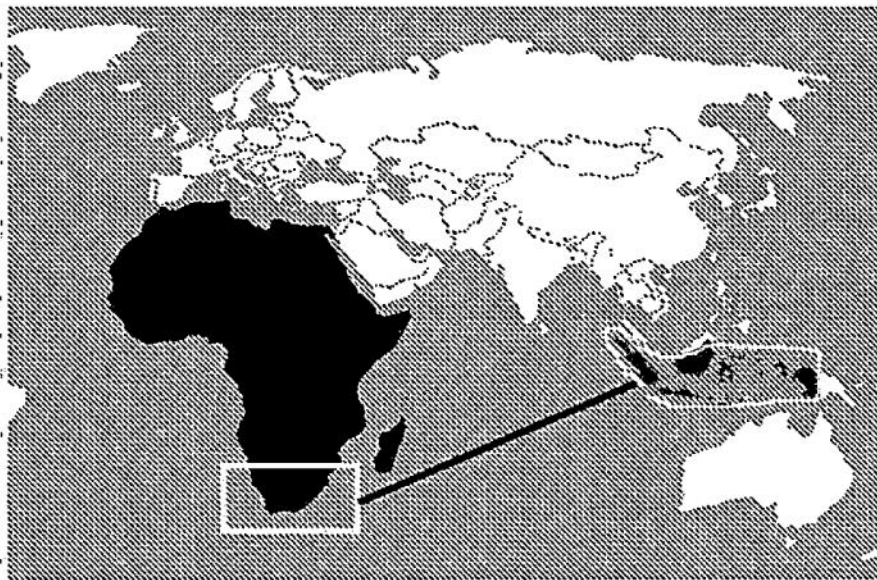
Kerja sama Ekonomi dan Hubungan Sosial Budaya ditunjukkan dengan mekanisme interaksi antar pemerintah, antar organisasi regional dan sub regional masing-masing negara serta antar masyarakat (*people-to-people contact*).

Dengan pilar-pilar tersebut, tidak hanya hubungan bilateral kedua negara saja yang semakin baik, namun hubungan dengan masyarakat dan antar kawasan semakin erat. Kemajuan dan pertumbuhan yang semakin baik ditunjukkan dengan kerja sama dalam bidang ekspor dan impor antara Indonesia dan Afrika Selatan yang sampai saat ini dipertahankan dan terus diperluas jangkauannya. Namun ekspor dan impor antara Indonesia dan Afrika Selatan dianggap masih belum maksimal. Langkah-langkah kebijakan pemerintah sangat dibutuhkan untuk mempertahankan hubungan baik ini dengan cara menambah kerja sama dan peningkatan komoditi ekspor dan impor antar kedua negara tersebut. Hal ini dilakukan agar kerja sama yang dijalin dapat saling menguntungkan guna memenuhi kebutuhan negara masing-masing.

Berikut adalah letak Indonesia dan Afrika Selatan dalam peta dunia.

Gambar 2.1

Letak Indonesia dan Afrika Selatan di Peta Dunia dalam Skala Besar³³



³³*E-Book "Exploring Africa" by Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia*